

ETIKA POLITIK
(Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab
***al-Siyâsah al-Syar'îyyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'îyyah*)**



Oleh:
Dedi Syaputra, S.H.I.
NIM. 09.234.531

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Islam tidak sedikit dianggap sebagai agama politik moral sebagai representasi dan pengijawantahan dari aspek hukum Islam, yang mengatur seorang muslim dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan, sosial dan politik. Aturan itu yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya, hubungan sosial dan politik, Muslim dan non-Muslim semuanya diperlukan tatanan etika, atau perilaku moral menjadikan hukum-hukum agama sebagai sumber penetapan sangsi moral. Islam memiliki dimensi-dimensi etika politik yang jauh lebih komprehensif, mulai dari dimensi tujuan, sarana dan aksi dari aktor politik itu sendiri. Akan tetapi dalam etika politik, perilaku seorang pemimpin menentukan arah kebijakan bagi yang dipimpin, kehendak baiknya yang ditopang institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) yang adil, mampu berperan mengorganisir tanggung jawab atas etika yang lahir dari sebuah kesepakatan bersama (*konsensus/ijmak*).

Etika politik Ibnu Taimiyah dengan melihat semua pola hubungan manusia dengan rasa kemanusiaan, sekaligus mengarahkan kaum muslim untuk meraih kekuatan dan kemuliaan dengan mengukir sejarah kebesaran. Ungkapan tersebut sesungguhnya, Ibnu Taimiyah menginginkan ada pola pelayanan yang baik antar manusia, yang beroperasi dengan dakwah “seruan proporsional” *manhajiyah*, menciptakan hubungan yang transparan atas kepentingan bersama antar umat yaitu pemimpin dengan yang dipimpin, yang mengembalikan hukum dengan perbuatan manusia menuju pada hukum transedental ciptaan Allah SWT, di dalamnya terdapat rincian penerapan hukum dalam kehidupan manusia

Dalam kerangka itulah penulis melihat gagasan tersebut, Ibnu Taimiyah tampil dengan konsep amal ma’ruf nahi mungkar-nya “etika politik” merupakan kewajiban semua umat Islam untuk melaksana tanggung jawab ini, dalam rangka untuk memelihara rakyat “people” dari negara yang melupakan keadilan dan amanah atas titipan Tuhan. Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analitik*, yaitu secara sistematis peneliti mendeskripsikan dan mempelajari karya-karya Ibnu Taimiyah berupa latar belakang pemikiran dan sosial politik kehidupannya, hermeneutika salah satu cara penemuan kembali (*hermeneutics of recovery*) sebagai penegasan tujuan dari interpretasi untuk menemukan makna asli suatu praktek sosial atau politik tertentu. Menurut penulis, karya *al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî Ishlâh al-Râ’i wa al-Ra’iyyah* Ibnu Taimiyah panduan utama penulis dalam penelitian ini.

Dalam proses penegakan pemerintahan yang baik, gagasan besar yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah negara yang ideal adalah melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai politik yang baik yaitu akuntabel (*al-amânah*), keadilan (*al-adâlah*), persaudaraan (*al-ukhûwah*), menghargai kemajmukan atau pluralisme (*al-ta’addudîyah*), persamaan (*al-musâwâb*), permusyawaratan (*al-syûrâ*), mendahulukan perdamaian (*al-silm*) dan kontrol (*amr bi al-ma’rûf nahy ‘an al-munkar*), al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam pandangan hidup (*way of life*), standar etika bagi Ibnu Taimiyah adalah berdasarkan wahyu Tuhan.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ETIKA POLITIK
(Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam *Kitab al-Siyasah
al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*)

Nama : Dedi Syaputra, S.H.I.
NIM : 09.234.531
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
Tanggal Ujian : 23 Agustus 2011

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam.

Yogyakarta, 12 September 2011

Direktur,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : ETIKA POLITIK

(Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam *Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*)

Nama : Dedi Syaputra, S.H.I.

NIM : 09.234.531

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.

Penguji : Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 2011

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : A- / 3,50

Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ETIKA POLITIK

(Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab

***al-Siyâsah al-Syar'îyyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'îyyah*)**

yang ditulis oleh:

Nama : Dedi Syaputra, S.H.I.
NIM : 09.234.531.
Prodi : Hukum Islam.
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam.

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2011
Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.
NIP. 150.276.308.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Syaputra, S.H.I.
NIM : 09.234.531.
Jenjang : Magister.
Program Studi : Hukum Islam.
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam.

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

Dedi Syaputra, S.H.I.
NIM. 09.234.531.

SENANDUNG MOTIVASI

“Sesungguhnya sekelompok orang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga-Nya, itulah ibadah para pedagang. Sekelompok orang lagi beribadah kepada Allah karena takut dari neraka-Nya, itulah para budak. Sekelompok orang berikutnya beribadah kepada Allah karena rasa syukur kepada-Nya, dan inilah ibadah orang-orang yang merdeka”.

***AKU PERSEMBAHKAN TESIS INI
UNTUK KEDUA ORANG TUA KU***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa hanya kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya. Amin.

Tesis dengan judul ***“Etika Politik (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî Ishlâh al-Râ’i wa al-Ra’iyyah)”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dua dalam Prodi Hukum Islam, Jurusan Studi Politik dan Pemerintahan Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa berterima kasih banyak atas selesainya tesis ini kepada berbagai pihak, karena bantuan, bimbingan dan motivasinya, maka tidak lupa penyusun aturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Khoiruddin Nasution selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Salam Arief, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Muhammad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Kepada Dosen Jurusan SPPI yaitu Prof. Dr. Amin Abdullah, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen, Prof. Dr. M. Abdul Karim, M.A., Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., Prof. Siswanto Masruri, M.A., Dr. Hamim Ilyas, M.A., Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., dan Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
7. Ucapan terima kasih yang tidak bisa terbalaskan kepada keluarga besar M. Syape'i, AM.pd., dan Hapsah, terima kasih Pak dan Mak atas semuanya.
8. Adekku semua, Muhardani, Ade Syahroni, dan Arijallulfikri semoga kalian lebih hebat dari Abang, dan Nikmatulmuafiroh, S.H.I., saya harap kamu bisa bersabar sedikit.
9. Kepada Kapalaska dan Mapalaska UIN Sunan Kalijaga, semoga kita tetap jadi keluarga selamanya.

Mudah-mudahan segala amal sholeh kita dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 27 Rajab 1439 H
28 Juli 2011 M

Penyusun

Dedi Syaputra, S.H.I.
NIM. 09.234.531.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor:157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقد ين عدة	Ditulis ditulis	muta‘aqqidīn ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis ditulis	Hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	a
ـِ	Fathah	ditulis	i
ـُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

--	--	--

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur' ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
SENANDUNG MOTIVASI	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. latar belakang	1
B. pokok permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : ETIKA POLITIK DALAM ISLAM	21
A. Etika Politik dalam Islam; sebuah Misi dan Visi	21

B. Etika Politik dalam Islam	30
1. Etika dan Moral	30
2. Etika dalam Islam	38
BAB III : ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH DALAM KITAB	
<i>AS-SIYÂSAH ASY-SYAR'ÎYYAH FÎ ISHLÂHIR RA'Î WAR RA'ÎYYAH</i>	53
A. Latar Belakang Etika Politik Ibnu Taimiyah	53
B. Amanat Kekuasaan	60
C. Pendistribusi Kekuasaan “Desicion Making” sebagai	
Etika Perlindungan Masyarakat	70
BAB IV : KONSEP DASAR MEMBANGUN ETIKA POLITIK	78
A. Ijtihad Sosial Ibnu Taimiyah	78
B. Keadilan dan Amanah Mewujudkan Kepentingan Rakyat	84
C. Negara; Pemimpin dalam Relasi Rakyat	90
D. Intervensi Negara terhadap Ruang Publik	99
BAB V : PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
CURRICULUM VITAE	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata “etika” kerap sekali muncul, terutama dalam kehidupan berpolitik yang meliputi proses persoalan publik dalam politik maupun proses pembuatan keputusan. Proses ini yang melahirkan dua faktor yaitu, pengembangan kelompok sosial; dan karakteristik hubungan struktural dalam kelompok. Menurut Anthoni Giddens, dalam merumuskan susunan masyarakat ada dua hal yang perlu diperhatikan, keduanya saling bertautan, yaitu struktur sosial (*social structure*), dan tindakan manusia (*human action*). Pertautan ini, melahirkan etika politik yang memiliki standar nilai yang berlaku, berlangsung secara teratur dan berpola pada satu kaidah tertentu.¹

Dari ungkapan persoalan di atas, kata “etika” terkait erat dengan pertanyaan bagaimana seharusnya hidup, apa yang membuat sebuah tindakan menjadi benar dan salah, dan serta apa tujuan dari sebuah tindakan.² Pertanyaan tersebut mempertanyakan apakah perbuatan itu etis atau tidak dalam artian normatif. Dalam tataran filsafat, etika dipahami tidak hanya sebatas aspek normatif saja dalam perilaku, melainkan lebih pada motivasi tindakan dan cara berpikir. Dengan asumsi bahwa pengetahuan etika merupakan pengetahuan tentang apa

¹ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum; Esai-Esai Ilmiah untuk Pembaruan* (Yogyakarta: Madyan press, 2002), hlm. 102. catatan Anthoni Giddens, *Sociology* (Oxford: Polity Press, 1992).

² Peter Sirger (ed), *Ethics* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 3.

yang harus dan tidak harus dilakukan, sikap apa yang harus dan tidak harus dilakukan, atau sedang dan ingin dilakukan, maka etika terkait erat dengan cara berpikir (*way of thought*) manusia pada umumnya. Cara berpikir itulah yang melahirkan tindakan dan perilaku.³

Dengan demikian, cara berpikir, tindakan dan praktek perilaku seseorang, akan sangat dipengaruhi kondisi sosial budaya dan historis. Dalam konteks sosial-historis, sebuah keputusan etika diambil untuk mengatasi sebuah masalah. Dalam mengatasi persoalan, etika menjadi sebuah standar prosedur untuk membuat satu keputusan untuk menyelesaikannya. Etika dalam bentuknya sebagai sebuah prosedur keputusan dalam situasi konflik, menjelma sebagai ungkapan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam politik.

Sementara itu, dalam keputusan politik Islam, etika muncul dalam setiap mengambil sebuah keputusan dari suatu persoalan, tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirugikan atau sebaliknya, satu pihak yang diuntungkan. Dalam politik Islam, Islam yang dibawa oleh Muhammad, merupakan agama samawi terakhir dari seluruh rangkaian kenabian sejak nabi Adam, diyakini sebagai agama yang sempurna, lengkap, dan mengatur segala dimensi kehidupan manusia sepanjang zaman, dan batasan-batasan yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia (*human reason*).⁴

³ M. Amin Abdullah, *Antara al-Ghozali dan Kant: Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 38.

⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam* (Jakarta : PT. Pustaka Litera Antaranusa, 2002), hlm. 1.

Agama yang diyakini membawa panduan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, yang memiliki cara hidup, aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia merupakan suatu sistem untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku politik.⁵

Untuk itu diperlulah hukum yang mengaturnya, dan etika sebagai esensi dari berdirinya hukum tersebut. Etika dan hukum diorientasikan untuk mengatur dinamika kehidupan yang dibuat oleh manusia, melalui mekanisme dan prosedur yang sudah disepakati bersama. Lain halnya dengan cara padangan kaum (tradisional), norma moral dan hukum baik yang bersifat publik maupun individu didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif ilahiyah yang mempunyai watak sakral– dan perlu diperbarui secara ritual.⁶

Dalam logika agama, dasar aturan hukum dan moral selain Tuhan adalah bentuk pengingkaran. Itulah sebabnya kaum fundamentalis (pemahaman Barat) kekuasaan dan kedaulatan Tuhan berarti Tuhan merupakan satu-satunya pembuat hukum.⁷ Oleh karenanya, kaum fundamentalis menghendaki suatu pemerintahan teokrasi, di mana negara diposisikan seolah-olah merupakan “kepanjangan tangan Tuhan” perwakilan Tuhan di bumi.⁸ Hukum yang ia gunakan adalah hukum Tuhan.

⁵ Nidal R. Sabrin dan M. Hisyam Jabar, *Etika Bisnis dan Akuntan*, dalam Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 230.

⁶ Sindhunata, *Berfilsafat di Tengah Merebaknya Teror*, Basis No. 11-12, Thn. Ke 53, November-Desember 2004, (Yogyakarta: Kanisius), hlm 62.

⁷ Khalid Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* terj. Gita Ayu Rahmani & Ruslani (Jakarta : Ufuk, 2004), hlm. 18.

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

Namun dalam perkembangannya, politik Islam tidak sedikit dianggap sebagai agama politik moral yang sebagai representasi dan pengijawantahan dari aspek hukum Islam, yang mengatur seorang muslim dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan, sosial dan politik. Aturan itu mengatur hubungan mereka dengan non-Muslim, hubungan penguasa dengan rakyatnya, hubungan sosial dan politik, semuanya diperlukan tatanan etika, atau perilaku moral menjadikan hukum-hukum agama sebagai sumber penetapan sangsi moral.⁹

Dengan kondisi tersebut, pengembangan etika politik dalam Islam yang mengedepankan etika sebagai filosofis, merupakan agenda yang sangat signifikan untuk dikembangkan. Perkembangan itu, etika dapat kita konsepsikan dalam etika pemimpin yang dipimpin, yang melibatkan mulai dari penyusunan kebijakan, desain struktural dalam institusi dan organisasi pelayanan, sampai pada manajemen pelayanan, semuanya diperuntukan dalam satu misi yaitu untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan yang baik.

Oleh karena itu, pusat perhatian kita terhenti pada aktor-aktor dan institusi-institusi yang terlibat dalam fase-fase tersebut, apakah aktor-aktor dan institusi yang ada pada waktu itu mereka benar-benar menjalankan tugas berdasarkan kepentingan publik atau tidak. Salah satu yang paling mendasar kenapa penulis ingin mencurahkan pikiran untuk menulis “etika politik” dengan alasan

⁹ Philip K. Hitti, *History of the Arabs; from the Earliest Time to the Present* (New York: Palgrave Macmillan, 2002), hlm. 501.

penyelenggara negara yang sudah tidak memperdulikan etika, yang memiliki orientasi universality dan keadilan bagi seluruh, bukan partukular bagi golongan.

Untuk itu, dalam menjalankan kebijakan publik, seharusnya memiliki nilai-nilai moral yang berlaku dalam otoritas tersebut, nilai tersebut bisa saja disimpulkan ke dalam enam hal yang berlaku secara umum (*six great ideas*), seperti nilai kebenaran (*truth*), kebaikan (*goodness*), kebebasan (*liberty*), kesetaraan (*equality*), dan keadilan (*justice*) atau ada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, etika politik yang seharusnya tumbuh ketika diterapkan pada pelayanan publik yang baik, perbuatan yang melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan. Dengan etika, ada standar dalam penilaian, “mungkin mengalami perkembangan”, untuk mencapai kedewasaan dan otonomi beretika secara substantif.¹⁰

Dalam pandangan penulis, melihat kondisi sosial politik yang ada pada saat ini sungguh memperhatikan. Sebagian orang terjebak pada politik keuntungan sendiri, yang berorientasi duniawi dan kering terhadap nilai-nilai ajaran kebenaran. Padahal yang melakukan itu boleh kita katakan orang-orang yang memiliki agama “Islam”. Begitu pula, kerancuan atau kesalahan dalam merumuskan kebijakan publik yang menjadikan tanggung jawab mereka.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, etika dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dimulai dari pemilihan aktor-aktor politik. Dengan

¹⁰ Majalah, *Perencanaan Pembangunan*, Edisi, 24. Th. 2001. Oleh. Yeremias T. Keban, Ph.D.

pemilihan bibit yang baik, bisa memprediksikan, apakah kebijakan yang dibuat lahir dari kepentingan bersama atau sebaliknya. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam membangun pemerintah yang baik adalah dengan pemilihan bibit yang memiliki standarisasi. Standar tersebut bisa kita sandingkan seperti Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, dalam aspek pemikiran Ibnu Taimiyah teori tentang etika politik dalam karya “*al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî Ishlâh al-Râ’i wa al-Ra’iyyah*” yang menggambarkan pemerintah dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat al-Qur’an dan Sunnah, di mana pemerintah berusaha untuk membangun masyarakat menurut idaman dan norma Islam. Dalam politiknya, bahwa pemerintah harus menerapkan tuntutan syarî’ah menurut kebutuhan zaman dan tempat masing-masing.¹¹

Ketika An-Na’im berpendapat, *syarî’ah* memiliki harapan cerah dalam kehidupan masyarakat Islam, kerana dapat menyiapkan anak-anak untuk hidup bermasyarakat, membina lembaga dan hubungan sosial. Syarî’ah akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika yang dapat direfleksikan dalam undang-undang dan kebijakan politik yang baik melalui proses politik yang demokratis. Menurutnya, berlakunya

¹¹ Tom Michel SJ, *Ibnu Taimiyah; Alam Pikiran dan Pengaruhnya di Dunia Islam*, Orientasi, 1983, hlm. 174-182.

hukum syari'at secara formal bukan kehendak hukum Islam akan tetapi kehendak politik.¹²

Perundang-undangan diwujudkan dalam sebuah negara untuk penegakan etika politik dalam Islam bukan lataran kehendak hukum Islam, tetapi kehendak kepentingan bersama dalam negara. Tetapi Islam sudah memiliki rambu-rambu etik serta prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk menjaga kestabilan, upaya dilakukan untuk mengatasi pertentangan itu.

B. Pokok Permasalahan

Dari gambaran latar belakang tersebut, saya menemukan beberapa permasalahan yang ingin penulis bahas dalam tesis ini. Saya ingin melihat kembali bagaimana peran dasar etika politik Islam dalam menangani persoalan publik yang berangkat dari gagasan Islam dan pemikiran politik Islam Ibnu Taimiyah.

1. Bagaimana etika politik dalam Islam.
2. Bagaimana konsep-konsep etika politik Ibnu Taimiyah dalam Kitab *al-Siyâsah al-Syar'îyyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'îyyah*.

¹² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *op. cit.*, hlm. 15.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah, haruslah mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas. Setidaknya ia harus memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian tentang **Etika Politik (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab *al-Siyâsah al-Syar'îyyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'îyyah*)** adalah keinginan penulis melihat kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam pemikiran tokoh politik Islam. Terutama yang berkaitan erat tentang etika politik dengan bingkai konsentrasi saya. Tujuan utama adalah untuk memberikan sumbangsih keilmuan pada almamater dan konsentrasi keilmuan saya yaitu Studi Politik dan Pemerintahan Islam.

Adapun kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis, mencoba membangun sebuah teori dan menganalisis dalam perangkat asumsi dari politik dan pemerintahan dalam Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah salah satu tokoh pemikiran politik Islam yang mengarah pada etika politik dan implementasinya.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini dapat membuka cakrawala pemikiran dan menjadi sumbangan pemikiran dalam penegakan kepentingan bersama.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan tentang etika politik dalam Islam, khususnya studi tentang etika politik Islam, susah dan jarang saya menemukan literatur yang sangat komprehensif. Khususnya yang membahas bidang pembahasan studi Islam. Ada, tapi cuma menjelaskan pada dataran teoritik saja. Pembahasan etika ini kami ingin mencoba pada dataran praktis dalam pelayanan yang baik, efektif, dan independent yang lepas dari komplik kepentingan, menurut penulis masih jarang.

Meskipun kajian tentang Ibnu Taimiyah telah banyak yang meneliti, baik itu biografi, politik, tata negara dan lain-lain. Salah satunya yang paling populer adalah karya Qomaruddin Khan menulis *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, membahas secara kritis kerangka teoritik Ibnu Taimiyah serta filsafat politiknya secara menyeluruh.¹³

Kajian ini diteruskan lagi oleh Kholid Ibrahim Jindan “*Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*”. Karya Jindan memang jauh berbeda dari karya Qomaruddin Khan, ia mencoba mengali lebih kritis lagi tentang dasar-dasar pemerintahan dan kekuasaan politik yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyah. Jindan mencoba mengkonfirmasi kembali khasanah-khasanah dasar, latar belakang akar dari kerangka pikir Ibnu Taimiyah. Salah satunya, upaya

¹³ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 3.

untuk menegaskan pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah tentang asal-usul, hakekat negara, prinsip-prinsip berbagai kewajiban undang-undang dan politik.¹⁴

Kemudian yang berkaitan dengan etika politik. Di antaranya adalah karya etika politik yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah sendiri, dalam karyanya; *al-Siyâsah al-Syar'îyyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'îyyah*, menekankan pada penegasan fungsi lembaga-lembaga negara.¹⁵

Dalam melihat sejauhmana efektifitas dalam lembaga-lembaga yang ada pada masa pemerintahan seseorang, Ibnu Taimiyah melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada masa itu. Kerangka- kerangka teoritik tersebut, yang di ungkapkan oleh Ibnu Taimiyah adalah dengan melihat semua hubungan manusia dengan rasa kemanusiaan, sekaligus mengarahkan kaum muslim untuk meraih kekuatan dan kemuliaan dengan mengukir sejarah kebesaran. Ungkapan tersebut sesungguhnya, Ibnu Taimiyah menginginkan ada pola pelayanan yang baik antar manusia, yang beroperasi dengan dakwah “seruan proporsional” *manhajiyah*, menciptakan pelayanan baik antar umat, yang mengembalikan hukum dengan perbuatan manusia menuju pada hukum transedental ciptaan Allah SWT, dalamnya terdapat rincian penerapan hukum dalam kehidupan manusia.

Selain itu, karya M. Arskal Salim G.P. berjudul *Etika Intervensi Negara; Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, di dalam buku ini, Arskal mencoba,

¹⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah* terj. Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1985), hlm. vi.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syar'îyyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'îyyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), hlm. ix.

Pertama, mengali lebih jauh biografi Ibnu Taimiyah. *Kedua*, Arskal menulis dengan kritis peran negara dalam melakukan intervensi dari berbagai persoalan rakyatnya dalam rangka untuk menunjukkan eksistensi kekuasaan. Orientasi dari penulis adalah ingin menunjukkan hukum bagi negara, perlu atau tidaknya negara melakukan intervensi dalam pembangunan ekonomi.¹⁶

Karya lain adalah Jeje Abdul Rajak “*Politik Kenegaraan; Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*”. Beliau mencoba mengali konsep-konsep politik kenegaraan berangkat dari perspektif masalah mursalah. Menurut Jeje, konsep kekuasaan politik Ibnu Taimiyah adalah *jalbûl mashaâlih wa dar’ul mafaâsid* dengan maksud adalah merumuskan tujuan dalam mempertahankan eksistensi tujuan syarî’ah.¹⁷ Meskipun dalam buku ini kaitan dengan etika politik sangat sedikit. Tapi bisa kita interpretasikan pada kebutuhan saat ini, bagi Taimiyah urusan politik sangat rumit, butuh pengertian yang sangat fleksibel, kecuali dibidang ibadah.

Disamping karya berbentuk buku, ada juga karya lain yang berbentuk tesis yang membahas pemikiran Ibnu Taimiyah, diantaranya adalah tesis Gyarso Widodo “*Politik Hukum dalam Islam; Telaah Kitab As-Siyâsah Asy-Syar’iyyah fî Islâh al-Râ’i wa al-Ra’iyyah Karya Ibn Taimiyah*”,¹⁸ tesis ini mencoba mengungkapkan

¹⁶ M. Arskal Salim G.P., *Etika Intervensi Negara; Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 1.

¹⁷ Jeje Abdul Rajak, *Politik Kenegaraan; Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hlm. 38.

¹⁸ Gyarso Widodo, *Politik Hukum dalam Islam; Telaah Kitab al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî Islâh al-Râ’i wa al-Ra’iyyah Karya Ibn Taimiya*, tesis, Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga, 2010.

pemikiran politik hukum Islam berdasarkan pada karya-karya Ibn Taimiyah, dengan alasan melihat elemen-elemen terpenting yang terkandung dalam pokok pemikirannya tentang hukum dan tujuan apa yang hendak dicapai dari karya tersebut. Menurut Gyarso, pemikiran hukum Ibn Taimiyah identik dengan penegakan pemerintahan syarî'ah (*syarî'ah oriented*).

Tesis lain adalah karya M. Nur "*Realisme Ibn Taimiyyah (Telaah Kritis Pemikiran Islam Era Skolastik)*".¹⁹ Nur menelaah tentang ketegasan Ibnu Taimiyah dalam memandang filsafat, ia menduga Ibnu Taimiyah lebih bercorak realis ketimbang empiris (memiliki variabel *measureable*, *abservable* dan *verifiable*). Untuk itu, dalam tesisnya ia menguraikan tentang penyelusuran seputar epistemologi di dalam dunia Islam, pandang Ibnu Taimiyah tentang dunia filsafat yang meliputi pemikiran keagamaan Ibnu Taimiyah, fitrah sebagai dasar pengetahuan Manusia, al-Qur'an dan Sunnah sebagai premis pasati, serta aspek-aspek realisme dalam pemikiran Ibnu Taimiyah.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teori ini, saya ingin mencoba dari ungkapan Hans Kung "*Tak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antaragama*". Ungkapan ini menunjukkan bahwa pran agama dalam pergolakan tingkah laku masyarakat sangat diprioritaskan. Dalil ini yang melahirkan satu bidang baru dalam berkehidupan.

¹⁹ M. Nur, *Realisme Ibn Taimiyyah (Telaah Kritis Pemikiran Islam Era Skolastik)*, tesis, Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Kesatuan inilah, perlunya satu kaidah-kaidah etik yang menciptakan aturan-aturan dan penyusunan masyarakat yang benar-benar manusiawi.

Sebagai institusi moral, agama tentu juga menawarkan ide besar tentang moral (*big ideas*) yang bersifat preskriptif bagi penganutnya. Oleh karena itu agama menjadi salah satu dasarnya moralitas, dan ajaran-ajaran agama sering disebut sebagai etika religius. Karakter dasar ide-ide moral berbasis agama ini adalah menyangkut ukuran kebenarannya, yakni *iman* (trust), bukan penalaran logis atau bukti empiris sebagai argumennya seperti halnya dalam metode-metode ilmiah. Hal itu tentu saja karena sumber kebenaran agama adalah otoritas wahyu (Tuhan), berbeda dengan filsafat bersumber pada rasio.²⁰

Semakin hari manusia semakin cerdas dalam menilai sesuatu, mereka mulai memainkan perannya, konsep ruang publik (*public space*) yang menghendaki keterbukaan mengandung konsekuensi logis adalah pemahaman agama harus bercorak relatif dan pluralistik, karena faktor manusia dan masyarakat dengan berbagai latar belakang; sosial, kultur, politik, psikologi, dan tara keilmuan diposisikan sebagai subjek dalam aktifitas penafsiran teks-teks agama. Akhirnya tidak ada pemahaman tunggal, absolut, dogmatis dan monoton ketika suatu agama berada di ruang publik.

Islam yang mengajarkan orang bagaimana bertindak dan berperilaku yang baik adalah sebuah deklarasi “*tak seorang pun diantara kamu yang beriman*

²⁰ Ulil Abshar-Abdalla, *Nabi, Dukun dan Penyair*, Jawa Pos, 22 Januari 2006.

*sepanjang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri”.*²¹

Secara teori menceritakan tidak ada sebuah negara yang tidak memiliki etika sebagai sebuah dasar dalam mendirikan negara.

Kontek pemikiran Islam, al-Gazali sejalan dengan pemikiran Plato dan Aristoteles, mereka tidak memisahkan antara moral dan politik, keduanya saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. Keduanya akan menentukan nilai baik buruk atau benar dan salah dari setiap tindakan dan keinginan masyarakat, maka politik sebagai otoritas kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan moral yang di terima oleh anggota-anggota masyarakat.²²

Meskipun etika dengan moral jauh berbeda, Franz Magnis Suseno membedakan pengertian ajaran moral dengan ajaran etika.²³ Ajaran moral adalah wejangan, khotbah-khotbah, kumpulan atau ketetapan baik tulisan maupun lisan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika adalah merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika adalah bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang tanggung jawab berhadapan dengan ajaran moral.²⁴

²¹ Hans Kung dan K. Josef Kuschel, *A. Global Ethic: The Deklaration of the world's Religion* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. xxi.

²² Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Iman Al Gazali* (Jakarta: Bulan Bitang, 1975), hlm. 157.

²³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 12-14.

²⁴ Megandaru W. Kawuryan, *Kamus Politik Modern* (Yogyakarta: Pura Pustaka, 2008), hlm. 115.

Etika atau al-akhlak dalam hazanah pemikiran Islam dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk. Dalam kontek Islam, etika sejalan perkembangan jaman, serta semangat dan cita-cita Islam dalam menegakan *amar ma'rûf* dan *nahî mungkar* untuk menghindari perbuatan saling mengzalimi.

Dari sikap dan tanggung jawab, melahirkan sebuah sikap dan konsep etika politik yang kemudian disebut sebagai; *Pertama*, nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut “sistem nilai”. *Kedua*, sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan kode etik. *Ketika*, sebagai ilmu tetang yang baik atau buruk, yang sering disebut filsafat moral.²⁵ Dalam kerangka teori ini, saya ingin mencoba melihat Islam sebagai *way of life* sebagai pandangan hidup yang baik, dan memiliki *moral code* atau *rule of conduct* dalam melayani rakyat.

Islam datang dengan *resource* yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu al-Qur'an sebagai sumber utama, dan dipertegaskan dengan Sunnah Nabi dari orang-orang pilihan-Nya. al-Qur'an sebagai dasar bagi manusia kepada hal-hal akan dilakukan, memberikan tekanan-tekanan atas amal perbuatan manusia (*human action*) dari pada gagasan. Artinya al-Qur'an memperlakukan kehidupan manusia sebagai keseluruhan aspek yang organik, semua bagian harus dibimbing

²⁵ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 22.

dengan petunjuk dan perintah-perintah etik dan moral yang bersumber dari wahyu. Mengajarkan konsep kesatuan yang padu dan logis.

Menurut Syafii Maarif, al-Qur'an dapat kita pahami sebagai perintah-perintah moral tertentu sebagai cita-cita politik Islam yang diambil dari al-Qur'an dan dapat diterjemahkan secara nyata, baik itu aspek ekonomi, sosial, politik dan kultural.²⁶

Dari kerangka teori diatas, dapat diasumsikan etika politik merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan dan tanggung jawaban atas realitas kehidupan. Dengan demikian yang harus diupayakan adalah mengkonsepkan dan mengelaborasi secara mendalam fenomena terhadap pandangan al-Qur'an tentang etika dalam pelayanan rakyat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian ilmiah, karena dalam penelitian ini mencoba mengali ide-ide dan gagasan yang objektif tentang prinsip-prinsip dasar tentang etika dalam ranah memahami politik Islam. Dari sumber datanya, penelitian ini disebut penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memanfaatkan secara maksimal bahan-bahan pustaka yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.²⁷ Tentu saja penulis mencari bahan-bahan

²⁶ A. Syafii Maarif, *Studi Tentang Pencaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 11.

²⁷ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan langsung terhadap karya-karya Ibnu Taimiyah.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pendekatan kajian dengan hermeneutik, yaitu mencoba menafsirkan dan memahaminya secara sederhana, serta mencoba menjelaskan kembali secara kritis dan detail dengan proses interpretatif.²⁸ Disini terdapat dua definisi hermeneutik; *Pertama*, merupakan bangunan prinsip-prinsip metodologi dalam penafsiran. *Kedua*, merupakan eksplorasi filosofis tentang karakter-karakter dan kondisi yang dimaksud bagi pemahaman yang utuh.

Di sisi lain, hermeneutika sebagai penemuan kembali (*hermeneutics of recovery*)²⁹ menegaskan tujuan interpretasi adalah menemukan makna asli suatu praktek sosial atau politik tertentu, agar mendapatkan dan mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan atau dipikirkan oleh pengarang.³⁰ Untuk menemukan apa yang ingin penulis cari, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika muncul beberapa implikasi pada ide, kepercayaan, dan niat si pelaku dan pengarang merupakan arti dan tindakan yang menjadi teks sosial, dengan pendekatan ini melihat sebagai serangkaian metodologis yang dibutuhkan untuk mengatasi tipe pemahaman tekstual menjadi sebuah pemahaman yang bersifat kontekstual.

²⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 96.

²⁹ Suwardi Endraswari, *Metodologi Penelitian Folklor; Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: MedPress, 2009), hlm. 151-152.

³⁰ Micheal T. Gibbons, *Interpreting Politics*, terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hlm. xxvii.

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan metode *deskriptif analitik*³¹, yaitu secara sistematis peneliti mendeskripsikan dan mempelajari karya-karya Ibnu Taimiyah berupa latar belakang pemikiran dan kehidupannya, dan pendapat para ahli yang relevan juga digunakan. Tahap berikutnya penulis mencoba melakukan *interpretasi*,³² sesuai dengan keinginan yang hendak diteliti. Artinya peneliti mendalami keseluruhan pemikiran Ibnu Taimiyah secara mendalam tetap bertumpu pada evidensi objektif, untuk memperoleh keotentikan dan orisinalitas mengenai etika politik Ibnu Taimiyah. Dalam metode ini tentu mempunyai sebuah konsekuensi yang tajam dalam andilnya membentuk *system of thought* (cara berpikir) bagi peneliti, konsekuensinya dengan kondisi sosial sosiologis yang berbeda.³³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan tesis ini, penyusun mencoba menggunakan pokok pembahasan secara sistematis yaitu terdiri lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai pembahasan yang kongkrit. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk secara general untuk memudahkan memahami tesis ini. Sebab pada dasarnya bab ini

³¹ Sujono Sumargono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Nurcahya, 1983), hlm. 21.

³² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Ilmu Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1993). *Cari lagi* 285.amin a.

³³ M. Amain Abdullah, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas ?* cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 287-288.

belum dijelaskan secara komprehensif tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis mencoba menggali kembali gagasan-gagasan etika politik dari pandangan Islam. Bab ini terdiri dari etika politik dalam Islam; sebuah misi dan visi, konsep-konsep etika politik dalam Islam yang dimulai dari konsep dasar yaitu etika, akhlaq dan moral dan etika politik dalam Islam.

Bab ketiga, penulis mencoba membahas etika politik Ibnu Taimiyah dalam Kitab *al-Siyâsah al-Syar'îyyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'îyyah* yang bertujuan untuk mempersandingkan kerangka berpikir secara sistematis, serta menunjukkan entitas pemikiran tokoh politik Islam. Dalam bab ini pembahasan terdiri dari latar belakang etika politik Ibnu Taimiyah, dan menjelaskan amanat kekuasaan, dan pendistribusi kekuasaan “decision making” sebagai etika perlindungan masyarakat.

Bab keempat, saya mencoba konsep dasar membangun etika politik Ibnu Taimiyah. Dalam bab ini pembahasan terdiri dari konsep dasar membangun etika politik, ijtihad sosial Ibnu Taimiyah, keadilan dan amanah dalam rangka mewujudkan kepentingan rakyat, Negara; pemimpin dalam relasi rakyat, dan terakhir intervensi negara dalam ruang publik.

Bab kelima adalah bab terakhir dari pembahasan tesis ini, meliputi kesimpulan dari pandangan Islam dan konsep etika politik Ibnu Taimiyah dalam membangun pemerintahan dan lembaga yang baik dan saran-saran untuk diri sendiri maupun orang yang hendak akan menjadi pengelola negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persoalan etika sangat penting dan kebutuhan mendasar dalam berbagai hal, karena etika atau ilmu akhlaq adalah bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Umat Islam tidak akan terjadi perdebatan yang akut, asal memiliki tujuan bersama yaitu memandang aspek-aspek etis al-Qur'an. Menurut Fazlur Rahman, kalau kita berlandaskan etika yang kokoh, perbedaan yang terjadi dapat dirujukan pada landasan-landasan etis. Dengan tegas ia mengatakan, janganakan kemungkinan, kebutuhan untuk pintu *ijtihad* itu sendiri pun tertutup.

Pendapat ini menggambarkan bahwa betapa etika sangat dibutuhkan sekali sebagai landasan hidup (*world view*) dalam segala hal. Bagi Ibnu Taimiyah, etika kerangka berpikir bagaimana seharusnya kita bertindak, sebagai satu tujuan yaitu menjadikan dunia ini damai dan sejahtera berasaskan amanat yang dijalankan dengan rasa keadilan, meskipun konsep etika dalam Islam masih diperdebatkan dalam dunia akademisi.

Berkaitan etika politik Islam atas pemimpin yang dipimpin, tidak seharusnya kita berbuat kecurangan dalam mengelola negara karena itu semua adalah amanah yang diberikan Allah.

Menurut penulis, kebutuhan sebuah pemerintahan yang bersih dan adil untuk yang dipimpin sudah seharusnya kita bisa mengambil sebuah motivasi yang

dikonsepkan oleh Ibnu Taimiyah. Seharusnya, pengelola negara memiliki andil besar dalam melaksanakan tugas politik, apalagi berkaitan etis atau tidak sebuah kebijakan dikeluarkan oleh penguasa. Dalam berbagai bab. Penulis ingin mengambil beberapa kesimpulan dari pemikiran Ibnu Taimiyah diantaranya:

1. Ibnu Taimiyah ingin mengembalikan konsep dasar etika politik, baik dari pemerintahan, pelayanan, dan hukum dikembalikan kepada gagasan besar yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun dalam pemikiran Ibnu Taimiyah ada yang menginterpretasikan memiliki orientasi kepenegakkan syari'at Islam.
2. Ibnu Taimiyah mencoba melihat ruang publik (*public sphere*) berakar dari orientasi publik yang berpijak dari konsep kepentingan bersama dengan tujuan jaminan sosial dari negara atas kepentingan bersama. Bagi Taimiyah, manusia membutuhkan ruang gerak dan kebebasan, baginya, setiap manusia yang hidup mempunyai kehendak dan tuntutan di dalam dirinya, ini yang mendorong timbulnya tindakan dari dirinya dan orang lain. Negara harus memberikan ruang dan jaminan perlindungan bagi masyarakat, untuk itu semua, karena sesungguhnya manusia itu hidup digerakkan oleh kehendaknya.
3. Jika amanat kekuasaan dijalankan dengan keadilan dan kejujuran dalam pemerintahan (lembaga-lembaga), sangat dimungkinkan kesuksesan akan diraih, siapapun yang mengendalikan pemerintah. Sebaliknya, justru pemerintahan yang zalim sekali terjerumus dalam kehidupan tanpa arti

apapun terbungkus dengan berbagai ragam kewajiban pemerintahan. Bagi Ibnu Taimiyah, nilai keadilan dianggap sangat penting dalam pemikiran politiknya, sehingga keimanan bila disangkutkan dengan pemerintahan. Menurutnyanya “Allah mendukung negara yang adil meskipun atheistik, namun Allah tidak memberikan dukungan pada negara yang tidak adil kendati dijalankan atas dasar keimanan.

4. Ibnu Taimiyah dalam ijtihad sosialnya atas yang dipimpin yaitu agar terjadi fleksibilitas dan kemudahan, tidak ada taklik bagi orang yang selagi mampu.

B. Saran-Saran

Kajian tentang pemikiran Ibnu Taimiyah sudah banyak sekali yang meneliti, dari berbagai macam latar belakang peneliti mengkajinya. Banyak akademis mengkaji tentang latar belakang kehidupan, pemikiran, dan *big ideas*-nya. Ibnu Taimiyah menurut penulis, pemikirannya sangat-sangat luar biasa, bagaimana seharusnya pemerintahan tugas-tugasnya dengan tidak mengecewakan rakyatnya sendiri, bagaimana ajurannya saling menghargai pendapat orang, menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya suatu keniscayaan baik. Untuk dalam mensukseskan kepentingan rakyat (*public interest*) ke dalam ranah hukum, seharusnya pemerintahan “Islam” harus mampu memahami kondisi sosial dalam negaranya.

Saran penulis, bagi pembaca ingin meniatkan diri menjadi seorang kepala negara, tanamkan konsep-konsep yang ditawarkan etika politik Ibnu Taimiyah, adil, amanah, dan tidak mengorbankan orang lain atas kehendak pribadi, kelompok, dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fareed dan Ahmad, Salahuddin, *God, Islam, the Skeptic Mind: A Study Faith, Religios Diversity, Ethics and the Problem of Evil* terj. Rudy Harisyah Alam, Bandung: Mizan, 2008.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Ad-Din Wa ad-Daulah Wa Tathbiq asy-Syarî'ah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Amin, Ahmad, *Al-Akhlaâq* terj. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan bintang, 1975.
- Al- Qardawi, Yusuf, *Legalitas Politik; Dinamika Perspektif Nash dan Magashid Asy-Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI, 1999.
- _____, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, Yogyakarta: LESFI, 1999.
- Ash-Siddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthâniyyah* terj. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekontruksi Syariah; Wacana Kekebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- _____, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler; Negosiasikan Masa Depan Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2007.
- Abdullah, Taufik (ed), *ensiklopedia Tematis dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Abdullah, M. Amin, *Antara al-Ghozali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- _____, Amin, *Pengembangan Kajian Ke-Islaman; Metode dan Pendekatan Program Pascasarjana UIN/IAIN/STAI*, Makalah di sampaikan IAIN Imam Bonjol Padang, 26-28 Desember 2008.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Demensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Jakarta : PT. Pustaka Litera AntaraNusa, 2002.

- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Ahmad, Zainal Abidin *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Iman Al Gazali*, Jakarta: Bulan Bitang, 1975.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah; dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: Indonesia Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991.
- Black, Antony, *The History of Islamic Political Thought; from the Prophet to the Present* terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2006.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bakry, Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Widjaya, 1992.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dahlan, Moh., *Epistimologi Hukum Islam; Studi atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im*, disertasi Doktor Ilmu Agama Islam, Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjan UIN, 2006.
- Djanika, Rahmat, *Sistem Ethika Islami*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Daradjat, Zakiyah, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- El-Fadl, Khalid Abou, *Islam dan Tantangan Demokrasi* terj. Gita Ayu Rahmani & Ruslani, Jakarta : Ufuk, 2004.
- _____, Khaled M. Abou *Atas Nama Tuhan; dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Jakarta: Serambi, 2004.
- Esposito, John L. & Voll, Jonh O, *Islam and Democracy* terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.

- Esposito, John L. *the Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word* terj. Eva Y.N., Dkk., Vol. II, Bandung: Mizan, 2001.
- Empat Esai Etika Politik*, Jakarta: www. Srimulayani.net, 20011.
- Fahmi, M. *Islam, Transendental Menelusri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Fakhry, Majid, *Ethical Theories in Islam* terj. Zakiyuddin Baidhawy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gibbons, Micheal T. *Interpreting Politics*, terj. Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam* terj. A. Mas'ada, Jakarta: RajaGrafindo, 1996.
- Giddens, Anthoni*, Sociology, Oxford: Polity Press, 1992.
- Ghozali, Abd Moqsith, *Metodelogi Studi al-Qur'an*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Hitti, Philip K., *History of the Arabs; from the Earlist Time to the Present*, New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Haryatmoko, Dr., *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Hidayat, Komaruddin *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996.
- _____, Komaruddin & Gaus AF, Ahmad (Ed), *Islam Negara & Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Hourani, Albert, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Bandung: Mizan, 2004.
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syar'îyyah fî Ishlâh al-Râ'i wa al-Ra'îyyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969.
- _____, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid. 28, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Hadistsah, 1996.

- _____, *Public Duties in Islam, The Institusi of the Hisba*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____, *Amrâdh al-Qulûb wa Syifa'uhâ wa al-Thufah al-Irâqiyyah fî al-Amâl al-Qolbiyyah*, Jakarta: Serambi, 2006.
- _____, *Majmu'atul Fatâwa*, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlaq* cet. VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah* terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam; Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah* terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1985.
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzan, 2005.
- Kung, Hans dan Kuschel, A. K. Josef. *Global Ethic: The Deklaration of the world's Religion*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam* terj. Zainudin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- _____, Abdul al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh* terj. Halimuddin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- _____, Abd. al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al- Qolam, 1978.
- Khan, Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Kawuryan, Megandaru W., *Kamus Politik Modern*, Yogyakarta: Pura Pustaka, 2008.
- Losso, Joseph & Williams, Leonard, *Political Theory Classic and Contemporary Readings* terj. Haris Munandar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005..
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Maarif, A. Syafii, *Studi Tetang Pencaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Muhajir, Noeng, *Filsafat Ilmu, Positivisme, Post Positivis, dan Post Modernisme*, edisi II, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.

_____, Muhammad Kholid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.

Munawwir, Imam, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikiran Islam dari Masa ke Masa*, cet. II, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.

Makdisi, George A., *Cita Humanisme Islam, Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruh Terhadap Renaisans Barat*, Jakarta: Serambi, 2005.

Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Nasution, Harun dan Azra, Azyumardi (Ed), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Noer, Deliar, *Pengantar Kepemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Russell, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat; Kaitannya dengan Kondisi Sosial-Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rajak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan; Pemikiran- Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Rajab, Mansur Ali, *Ta'ammulat fi al-Falsafah al-Islamiyyah*, al-Qahirah: Maktabah al-Anglo al-Misriyyah, 1961.

Syukur, Suparman, *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

_____, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

_____, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

_____, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Sularno, M., *Aspek-Aspek Siyasah Syar'iyah dalam Kompilasi Hukum Islam*; Telaah Hukum Warisan, Al-Mawarid 17 (1997).

Sholikhin, Muhammad, *Filsafat dan Metafisika dalam Islam; Sebuah Penjelajahan Nalar, Pengalaman Mistik, dan Perjalanan Aliran Manunggaling Kawulo-Gusti*, Yogyakarta: Narasi, 2008.

Sonny Keraf, A. , *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Sirger, Peter (ed), *Ethics*, Oxford: Oxford University Press, 1994.

Sabrin, Nidal R. dan Jabar, M. Hisyam, *Etika Bisnis dan Akuntan*, dalam Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Salim G.P., M. Arskal, *Etika Intervensi Negara; Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1998.

Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Stoddard, Lothrop, *Dunia Baru Islam* terj. H.M Muljadi Djojowartono, Dkk, Jakarta: Panitia Penerbit, 1966.

Rusli, Nasrun, *Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Rahman, Fazlur, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 2001.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1990.

_____, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Thontowi, Jawahir, *Islam, Politik dan Hukum; Esai-Esai Ilmiah untuk Pembaruan*, Yogyakarta: Madyan press, 2002.
- Tumagor, Rusmin & Arifin, Jaenal, *Peta dan Keragamam dan Kajian Tematik Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2002-2003.
- Tahqiq, Nanang (ed.), *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* cet. II, Yogyakarta: Pesantren Nawese Press, 2007.
- _____, Yudian (Ed), *Gerakan Wahabi di Indonesia; Dialog dan Kritik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Widodo, Gyarso *Politik Hukum dalam Islam; Telaah Kitab al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Islâh al-Râ'i wa al-Ra'iyah Karya Ibn Taimiya*, tesis, Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Nur, M. *Realisme Ibn Taimiyyah (Telaah Kritis Pemikiran Islam Era Skolastik)*, tesis, Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

CURRICULUM VITAE

Dedi Syaputra adalah anak dari M. Syape'i dan Hapsah. Lahir di Muara Bungo-Prop. Jambi 26 Maret 1985. Setelah lulus dari SD No. 12 (1991-1998) Ds. Empelu, kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Falah (MTSs) Pasir Putih Muara Bungo (1998-2001), setelah lulus, hijrah ke pulau Jawa dan menyantri di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (2001-2004), lalu kuliah Fak. Sains dan Teknologi (2004-2005), karena aktif diluar kuliah terbengkalai, di tahun yang sama transfer ke Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Strata Satu ditempuh dalam waktu 5 tahun (2005-2009), dari kampus yang sama penulis melanjutkan ke Pascasarjana, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam (SPPI) 2011.

Ketika semasa Mahasiswa, penulis aktif di berbagai organisasi Keluarga Pelajar Jambi Yogyakarta (KPJ), sekretaris Majalah Kajanglako "Media Komunikasi KPJ Yogyakarta". Penulis juga pernah menjadi Sekjen Front Mahasiswa Nasional (FMN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis pernah menjadi relawan "Jogja Bangkit" juga sebagai Kepala Sekolah dalam Program *Children Center* (CC). Selain aktif diluar, penulis juga aktif di bidang kemahasiswaan (UKM) juga pernah jadi Wakil Ketua Pecinta Alam Sunan Kalijaga (MAPALASKA) Yogyakarta, tahun 2007 melakukan penelitian ke Sulawesi Selatan "*Mapalaska Research Expedition Look's East 07 Kajang Sulawesi Selatan*"

Dalam keseharian penulis aktif menulis di media online, salah satunya di www.dedisyaputra.wordpress.com, salah satu tempat mencurahkan gagasan, dan email sebagai tempat mengirimkan tulisan; de_disyaputra@yahoo.com.

Rencana setelah lulus, penulis ingin pulang kampung dan menjadi pelayan masyarakat. Penulis tinggal di Desa Empelu beralamatkan di Jalan Tanah Tumbuh Desa Empelu Kec. Tanah Sepenggal Kab. Muara Bungo-Jambi.